

ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN, KESEHATAN, KORUPSI, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI NEGARA APEC

Dita Ayu Anantika^{1✉}, Hadi Sasana²
^{1,2}Departemen IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro
✉Email: ditaayuanantika@students.undip.ac.id

Abstract

Human development is a global issue that is experienced in almost every country. The problem of human development becomes a matter that must be resolved in a sustainable manner because the low quality of human capital can be an obstacle to the economic growth of society in achieving prosperity. The purpose of this study is to examine the effect of education sector government expenditure, health sector government expenditure, corruption, and economic growth on the human development index.

This research uses secondary data covering 20 APEC member countries in the 2012-2017 period. The method used is panel data regression with the Fixed Effect model (FEM). The results of this study indicate that government expenditure in the health sector and corruption has a positive and significant effect on the human development index. While government spending in the education sector and economic growth has a negative and significant effect on the human development index

Keywords: human development index, government expenditure, corruption, economic growth.

PENDAHULUAN

Kualitas modal manusia merupakan faktor penting yang menjadi salah satu fokus utama pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara tersebut. Salah satu indikator dari kualitas modal manusia dapat dilihat dari meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pada manusia yang akan mendorong peningkatan produktivitas kerja, sehingga dapat mengurangi kemiskinan di masyarakat. Sementara itu, berakhirnya program *Millenium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2015 menjadi periode awal diresmikannya program *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai kesepakatan baru terhadap agenda pembangunan global untuk periode 2016- 2030 yang semakin mendukung pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan dengan mencakup pembangunan pada sektor sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup.

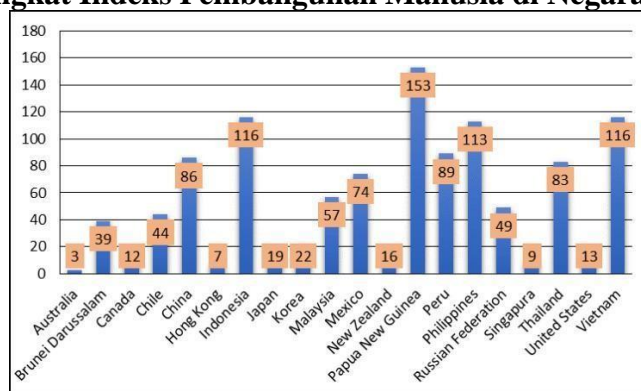
Konsep dasar pembangunan manusia juga dikemukakan oleh *United Nations Development Programs* (UNDP). Dalam *Human Development Report* (HDR) yang diterbitkan UNDP, dimana disebutkan bahwa “Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya”. Menurut UNDP, salah satu cara mengukur kualitas modal manusia di suatu negara dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau sering disebut dengan *Human Development Index* (HDI). *Human Development Index* (HDI)

merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mencerminkan kondisi suatu negara dibandingkan dengan kondisi negara lain dalam hal tingkat kesejahteraan masyarakat.

Sektor-sektor yang diukur dalam HDI meliputi angka harapan hidup sebagai ukuran kualitas kesehatan, rerata partisipasi sekolah sebagai ukuran kualitas pendidikan, dan pendapatan nasional bruto sebagai ukuran kondisi ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, permasalahan pembangunan manusia menjadi hal yang harus diselesaikan secara menyeluruh karena kualitas modal manusia yang rendah dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

APEC merupakan suatu blok perdagangan yang terbentuk karena wilayah Asia dianggap sebagai kawasan pengembangan ekonomi yang ideal di dunia. Namun di sisi lain, salah satu hal yang masih menjadi halangan dalam pembangunan ekonomi adalah adanya ketidakmerataan dalam kemampuan pembangunan manusia yang dicapai oleh negara-negara anggota APEC. Ketidakmerataan pembangunan manusia tersebut telah menjadi suatu kekhawatiran bagi negara-negara anggota, khususnya bagi negara anggota APEC yang pertumbuhannya masih tertinggal. Kondisi tersebut dapat dilihat pada Gambar 1 yang menunjukkan bahwa terjadi ketidakmerataan dalam tingkat pencapaian pembangunan manusia di antara negara-negara anggota APEC. Kondisi ketidakmerataan pembangunan manusia di antara negara anggota APEC ini tidak sejalan dengan berbagai upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh pemerintah negara terkait.

Gambar 1
Peringkat Indeks Pembangunan Manusia di Negara APEC Tahun 2017



Menurut Mankiw (2006), pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan perbaikan kualitas modal manusia, yaitu terdiri dari pendidikan dan kesehatan. Perbaikan pendidikan dan kesehatan SDM diharapkan bisa memperluas kesempatan untuk mencapai hidup yang layak. Modal manusia yang mengacu pada perbaikan pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar di suatu wilayah.

Sukirno (2005) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang digunakan untuk membeli barang dan jasa dalam rangka memberi pelayanan kepada masyarakat untuk mendorong pengembangan sumber daya manusia melalui perbaikan kualitas modal manusia dari sisi pendidikan dan kesehatan. Menurut Lubis (2013) pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang positif terhadap pembangunan melalui indeks pembangunan manusia. Saat ini prioritas utama pembangunan nasional masih bertumpu pada pembangunan fisik, mengalahkan bidang pendidikan yang memiliki arti dan bersifat strategis dalam memperbaiki kehidupan negara ini.

Menurut penelitian Sasana (2012) mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah daerah terhadap indeks pembangunan manusia menyatakan bahwa realisasi belanja pemerintah daerah memiliki pengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. Dengan alokasi belanja langsung yang tepat maka pembenahan infrastruktur daerah serta

fasilitas umum akan tetap baik, sehingga meningkatkan kualitas dan kuantitasnya serta meningkatkan produktivitas daerah, pendapatan masyarakat, dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu, alokasi penggunaan belanja tidak langsung secara tepat, akan menunjang kinerja dari masing-masing unit kerja dalam pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, permasalahan terkait korupsi membuat perekonomian menjadi terganggu karena pengalokasian anggaran pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat tidak berjalan secara efektif dan efisien. Sedangkan indikator pertumbuhan ekonomi digunakan untuk mengukur pembangunan manusia karena menggambarkan kondisi kemakmuran masyarakatnya yang diukur melalui besarnya pendapatan rata-rata penduduk di negara tersebut. Seligson & Kuznets (2019) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan suatu negara untuk dapat menyediakan semakin banyak barang dan jasa kepada penduduknya sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan. Menurut Ichvani & Sasana (2019), korupsi dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang signifikan, semakin bersih suatu negara dari korupsi maka pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat, sehingga dalam hal ini korupsi merupakan pengganggu dalam perekonomian.

Dari uraian di atas, kemampuan pengelolaan sumber daya ekonomi dan kemampuan sumber daya manusia menjadi tema sentral apakah pasar bebas Asia Pasifik akan menjadi pasar yang menjamin kesejahteraan bagi negara-negara anggotanya. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, Korupsi, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Negara APEC”.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pembangunan Manusia

Konsep pembangunan manusia (*human development*) telah diperkenalkan sejak tahun 1990 oleh *United Nation Development Programme (UNDP)* dalam *Global Human Development Report*. Konsep ini disebut sebagai paradigma baru model pembangunan. Menurut UNDP, pembangunan manusia merupakan proses perluasan pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging the people's choices*) dengan tujuan utama menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Menurut UNDP, salah satu cara mengukur kualitas modal manusia di suatu negara dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau sering disebut dengan *Human Development Index (HDI)*. *Human Development Index (HDI)* merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mencerminkan kondisi suatu negara dibandingkan dengan kondisi negara lain dalam hal tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui tiga sektor dasar pembangunan manusia, meliputi :

1. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)
2. Pengetahuan (*knowledge*)
3. Standar hidup layak (*decent standard of living*)

Pengukuran ini dilakukan dengan menetapkan beberapa asumsi dasar bahwa manusia yang berkualitas adalah: Manusia yang dapat hidup sehat dan panjang umur, sebagaimana diukur dengan Angka Harapan Hidup sejak waktu lahir (*life expectancy at birth*); Manusia yang memiliki kecakapan dan pendidikan yang diperlukan bagi hidupnya, sebagaimana diukur melalui indikator angka literasi orang dewasa (*adult literacy rate*) dengan bobot penilaian dua pertiga, serta indikator kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan dasar, menengah dan tinggi dengan bobot penilaian satu pertiga dari penghitungan indeks pendidikan; Manusia yang dapat mencapai standar

hidup layak, sebagaimana diukur dengan logaritma pendapatan domestik bruto (PDB) per kapita yang menggunakan indikator *Purchasing Power Parity* (PPP) yang dihitung dalam dolar Amerika.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah menetapkan standarisasi perhitungan IPM melalui nilai minimum dan nilai maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus penghitungan IPM dapat disajikan sebagai berikut :

$$IPM = \frac{1}{3} [X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}] \quad (1)$$

Keterangan

$X_{(1)}$: Indeks harapan hidup

$X_{(2)}$: Indeks pendidikan = $\frac{2}{3}$ (indeks melek huruf) + $\frac{1}{3}$ (indeks rata-rata lama sekolah)

$X_{(3)}$: Indeks standar hidup layak

Teori Pengeluaran Pemerintah

Menurut Colm & Musgrave (1960), pengeluaran pemerintah untuk sektor publik bersifat elastis terhadap pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, Mangkoesobroto (2014) memberikan penjelasan mengenai perkembangan teori makro menjadi tiga kelompok, yaitu:

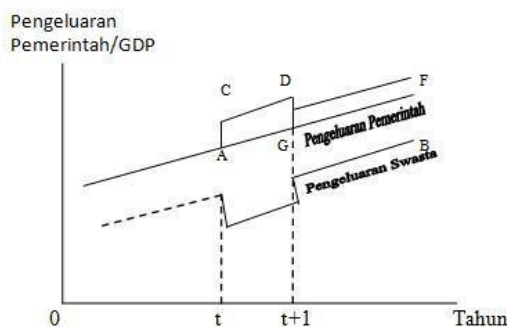
1. Model pembangunan oleh Rostow dan Musgrave

Colm & Musgrave (1960) mengemukakan bahwa terdapat hubungan antara perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan atas tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam presentase GNP akan bertambah besar, sedangkan presentase investasi pemerintah terhadap GNP akan semakin kecil. Lalu Colm & Musgrave (1960) menjelaskan bahwa dalam proses pembangunan ekonomi, peran pemerintah akan beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk program-program sosial dalam rangka pencapaian kesejahteraan bagi masyarakat.

2. Teori Peacock dan Wiseman

Peacock & Wiseman (1961) mengemukakan bahwa pemerintah akan berusaha untuk memperbesar pengeluaran pemerintah, sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang terlalu besar, dimana pajak tersebut digunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah yang semakin besar pula. Oleh karena itu, dalam keadaan normal akan terjadi peningkatan GNP yang menyebabkan penerimaan pemerintah semakin besar dan sejalan dengan semakin besarnya peningkatan pengeluaran pemerintah. Kemudian ketika terjadi keadaan tertentu yang mengharuskan pemerintah memperbesar pengeluarannya, maka pemerintah akan memanfaatkan pajak sebagai sumber alternatif dalam peningkatan penerimaan negara yang berakibat pada berkurangnya pengeluaran investasi dan konsumsi masyarakat. Keadaan ini disebut sebagai efek pengalihan yaitu adanya suatu gangguan sosial yang menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah.

Gambar 2
Teori Peacock dan Wiseman



Sumber : Mangkoesebroto (2014); h. 174

3. Hukum Wagner

Wagner & Weber (1977) menyatakan apabila pendapatan per kapita meningkat, maka secara relatif pengeluaran pemerintah juga akan meningkat. Wagner & Weber (1977) mendasarkan teorinya dengan teori organis mengenai pemerintah (*organic theory of state*) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak dan terlepas dari anggota masyarakat yang lain, sehingga memiliki kelemahan karena tidak didasarkan pada teori pemilihan barang-barang publik.

Korupsi

Korupsi merupakan suatu masalah penting di pemerintahan yang dapat mengurangi kesejahteraan masyarakat karena adanya ketidaktepatan alokasi anggaran publik yang seharusnya dapat digunakan untuk peningkatan pembangunan manusia.

Korupsi diasumsikan berpengaruh terhadap pengeluaran negara dalam meningkatkan pembangunan manusia. Hal ini sejalan dengan hasil dari beberapa penelitian yaitu:

1. Penelitian Rajkumar & Swaroop (2008) di 91 negara menemukan bahwa korupsi menghambat keefektifan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan dalam meningkatkan tingkat pendidikan dasar dan mengurangi angka kematian bayi.
2. Penelitian Suryadarma (2012) menemukan bahwa korupsi di Indonesia menghambat keefektifan pengeluaran publik di bidang pendidikan dalam mencapai *outcome*.

Pertumbuhan Ekonomi

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia dipengaruhi oleh 2 (dua) jalur utama, yaitu jalur aktivitas rumah tangga dan jalur kebijakan pemerintah. Kecenderungan aktivitas rumah tangga untuk membelanjakan sejumlah faktor yang langsung berkaitan dengan indikator pembangunan manusia dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, perubahan tingkat harga, tingkat pendidikan serta tingkat kesehatan.

Tingkat pendapatan dapat digambarkan melalui PDB per kapita. Tingkat pendapatan yang relatif tinggi akan cenderung meningkatkan belanja rumah tangga untuk peningkatan pembangunan manusia. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat langsung terhadap peningkatan pembangunan manusia melalui peningkatan pendapatan.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari *Human Development Report*, *Transparency International*, *World Bank*, serta sumber lain yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang merupakan gabungan dari data time series dan data cross section pada 20 negara anggota APEC dari tahun 2012-2017 yaitu Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, China, Hongkong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, New Zealand, Papua Nugini, Peru, Filipina, Rusia, Singapura, Thailand, Amerika Serikat dan Vietnam.

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia
IPM merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga hal mendasar pembangunan manusia. Data IPM yang digunakan dalam penelitian ini adalah IPM dari 20 negara anggota APEC pada tahun 2012-2017 yang diukur dalam satuan persen.
2. Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan
Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan merupakan pengeluaran pemerintah di suatu negara untuk sektor pendidikan dari total anggaran pendapatan dan belanja yang dialokasikan untuk sektor pendidikan. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah anggaran pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan di 20 negara anggota APEC pada tahun 2012-2017 yang diukur dalam satuan persen.
3. Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan
Pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan merupakan pengeluaran pemerintah di negara untuk sektor kesehatan dari total anggaran pendapatan dan belanja yang dialokasikan untuk sektor kesehatan. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah anggaran pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan 20 negara anggota APEC pada tahun 2012-2017 yang diukur dalam satuan persen.
4. Korupsi
Menurut Transparency International (2012), korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik yang telah dipercayakan untuk keuntungan pribadi. Dalam penelitian ini, tingkat korupsi ditunjukkan melalui skor *Corruption Perception Index (CPI)* yang dikeluarkan oleh *Transparency International*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah skor CPI dari 20 negara anggota APEC pada tahun 2012-2017 yang diukur dalam satuan persen.
5. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai kemampuan suatu negara untuk dapat menyediakan semakin banyak jenis barang ekonomi kepada penduduknya yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional pada perekonomian suatu negara sebagai wujud peningkatan kesejahteraan masyarakat di negara tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan GDP per kapita dari 20 negara anggota APEC pada tahun 2012-2017 yang diukur dalam satuan persen.

Metode Analisis

Dalam penelitian ini menggunakan data panel dengan model regresi linier berganda atau *Ordinary Least Square (OLS)* yang merupakan studi ketergantungan dari variabel dependen pada satu atau lebih variabel independen dengan tujuan untuk mengestimasi dan memprediksi rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang

diketahui. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, korupsi, dan pertumbuhan ekonomi) terhadap variabel dependen (indeks pembangunan manusia). Estimasi model yang akan digunakan adalah sebagai berikut.

$$IPMit = \beta_0 + \beta_1PPit + \beta_2PKit + \beta_3IPKit + \beta_4GROWTHit + \beta_5Di + ui \quad (2)$$

Dimana :

IPM	: Indeks Pembangunan Manusia (persen)
PP	: Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan (persen)
PK	: Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan (persen)
IPK	: Indeks Persepsi Korupsi (persen)
GROWTH	: <i>Gross Domestic Product per kapita</i> (persen)
Di	: <i>Dummy</i>
β_0	: Konstanta (Intersept)
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$: Parameter yang diduga
Ui	: Residual
I	: 1, 2, ..., 20 (Data <i>cross section</i> 20 negara anggota APEC)
T	: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Data <i>time series</i> dari tahun 2012-2017)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Deteksi Asumsi Klasik

Dari pengujian asumsi klasik yang dilakukan, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Hasil uji normalitas menunjukkan nilai probabilitas *Jarque-Bera* ialah sebesar 0.332912 yang mana lebih besar dari $\alpha = 0.05$ (5%). Sehingga hasil ini memenuhi syarat uji normalitas yang artinya data terdistribusi dengan normal.
2. Hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.0000 di mana lebih kecil dari 0.05 maka model penelitian terdapat masalah autokorelasi. Untuk mengatasi autokorelasi tersebut, maka perlu dilakukan peningkatan standar diferensiasi dari tingkat dasar menjadi tingkat 1 atau *first different* sehingga diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.1679 setelah diestimasi. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari 0.05 maka dapat disimpulkan tidak terdapat masalah autokorelasi pada model tersebut.
3. Hasil uji heteroskedastisitas yang menggunakan uji *Breusch-Pagan-Godfrey* (BPG) menunjukkan nilai p-value *Obs*R-square* 0.0002 yang lebih kecil dari 0.05 sehingga dalam penelitian ini terdapat masalah heteroskedastisitas. Namun dikarenakan dalam penelitian ini digunakan metode *Newey West HAC (Heteroscedasticity and Autocorrelation-Consistent) Standard Errors & Covariance* yang bertujuan untuk memperbaiki kesalahan *standard error* OLS dengan mengoreksi *standard error* pada permasalahan heteroskedastisitas dan autokorelasi, maka heteroskedastisitas yang terjadi dapat diterima.
4. Hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini didapatkan hasil output regresi kurang dari 0.995508 maka dapat disimpulkan bahwa model tidak mengalami masalah multikolinearitas.

Uji Statistik Analisis Regresi

Tabel 2 Hasil Regresi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.789.729	2.255.078	3.010.862	0.0000
X1_PP	-1.127.188	0.410847	-2.743.570	0.0071
X2_PK	0.371151	0.169979	2.183.509	0.0310
X3_IPK	0.363981	0.024082	1.511.418	0.0000
X4_GROWTH	-1.062.749	0.197028	-5.393.888	0.0000
R-squared				0.818603
Adjusted R-squared				0.812294
F-statistic				1.297.422
Prob (F-statistic)				0.000000

Sumber : Output Eviews, 2019

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan *R-squared* sebesar 0.818603 sehingga mengandung arti bahwa 81.86%. Sedangkan sisanya 18.14% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Nilai *R-squared* yang mendekati satu ini berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sementara itu, hasil uji F menunjukkan hasil F-statistik > F-tabel ($129.7422 > 3.11$) hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang artinya variabel penjelas secara serentak dan bersama-sama mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan. Sedangkan hasil uji T menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, korupsi, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara parsial terhadap indeks pembangunan manusia di negara APEC.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap IPM

Hipotesis pertama yang dilakukan pengujian pada penelitian ini adalah pengaruh variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia pada setiap negara anggota APEC, dimana dari hasil regresi data panel didapatkan nilai koefisiensi pengeluaran pemerintah sektor pendidikan sebesar -1.127188 dengan nilai signifikansi sebesar 0.0071 yang mana lebih kecil dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia secara parsial. Artinya, setiap kenaikan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan sebesar 1% akan menurunkan indeks pembangunan manusia sebesar 1.127188%.

Hasil serupa ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Mulyaningsih (2008) dan Mongan (2018) Permasalahan tersebut bisa saja terjadi dikarenakan pengeluaran pemerintah di sektor publik khususnya sektor pendidikan yang belum mampu memenuhi kebutuhan anggaran pada sektor pendidikan. Selain itu, jangkauan pelayanan pendidikan kepada masyarakat juga sangat mempengaruhi efektivitas dari alokasi pengeluaran pemerintah sektor pendidikan. Ketika pelayanan pendidikan kepada masyarakat semakin tidak terjangkau, maka kemiskinan akan terus meningkat terutama jika kebijakan yang ditetapkan dan dijalankan bukan kebijakan yang *pro poor*.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap IPM

Hipotesis selanjutnya yang dilakukan adalah pengujian pada penelitian ini adalah

pengaruh variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia pada setiap negara anggota APEC, dimana dari hasil regresi data panel didapatkan nilai koefisiensi pengeluaran pemerintah sektor kesehatan sebesar 0.371151 dengan nilai signifikansi sebesar 0.0310 yang mana lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia secara parsial. Artinya, setiap kenaikan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan sebesar 1% akan meningkatkan indeks pembangunan manusia sebesar 0.371151%.

Hasil serupa ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Subandoro (2017), Widodo, Waridin, & Kodoatie (2012), dan Mahulauw, Santosa, & Mahardika (2017) dimana hasilnya menunjukkan bahwa semakin tinggi alokasi pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan akan meningkatkan pula indeks pembangunan manusia di negara tersebut. dimana hasilnya menunjukkan bahwa semakin tinggi alokasi pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan akan meningkatkan pula indeks pembangunan manusia di negara tersebut. Hal ini dikarenakan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan yang digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana pada bidang kesehatan di suatu negara akan berdampak pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui penurunan angka kematian dan peningkatan angka harapan hidup masyarakat di negara tersebut. Saluran fiskal melalui belanja pada bidang kesehatan juga dikatakan berpengaruh terhadap pembangunan manusia, dimana ketika kualitas kesehatan masyarakat terjamin maka akan mampu meningkatkan tingkat produktivitas di negara tersebut. Oleh karena itu, kesehatan merupakan salah satu komponen penting dalam penghitungan indeks pembangunan manusia.

Pengaruh Korupsi terhadap IPM

Hasil pengujian regresi data panel pada variabel korupsi terhadap indeks pembangunan manusia pada setiap negara anggota APEC didapatkan nilai koefisiensi korupsi sebesar 0.363981 dengan nilai signifikansi sebesar 0.0000 yang mana lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel korupsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia secara parsial. Artinya, setiap kenaikan tingkat korupsi sebesar 1%, maka akan menyebabkan peningkatan terhadap indeks pembangunan manusia sebesar 0.363981%. Hal ini dikarenakan data yang digunakan adalah indeks persepsi korupsi dengan skala 0-100. Skala 0 menunjukkan hasil bahwa negara tersebut termasuk dalam kategori negara sangat korup dan nilai 100 menunjukkan hasil bahwa negara tersebut termasuk dalam kategori negara bebas korupsi. Oleh karena itu, semakin meningkatnya pembangunan manusia pada negara anggota APEC, maka akan semakin rendah pula permasalahan korupsi yang ada di negara tersebut karena anggaran pemerintah dapat dipastikan mampu dialokasikan dengan efektif dan efisien, sehingga anggaran tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakatnya.

Hasil serupa ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Hanafi (2018), Akcay (2006), Hysa (2011), Del Monte & Papagni (2001), dan Sims, Gong, & Ruppel (2012) yang menyatakan bahwa dalam peningkatan pembangunan manusia suatu negara tidak dapat terpisahkan dengan upaya-upaya pemberantasan korupsi di negara tersebut. Negara memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pengalokasian anggaran yang tepat. Namun ketika korupsi terjadi pada dana anggaran pemerintah yang seharusnya dapat digunakan untuk pengoptimalan program kerja yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, maka permasalahan tersebut akan berpengaruh pada fungsi dana anggaran dan kualitas kebijakan yang akan diambil pemerintah terkait kesejahteraan masyarakat secara umum.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap IPM

Pengujian pada variabel pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia pada setiap negara anggota APEC mendapatkan nilai koefisiensi pertumbuhan ekonomi sebesar -1.062749 dengan nilai signifikansi sebesar 0.0000 yang mana lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia secara parsial. Artinya, setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% akan menurunkan indeks pembangunan manusia sebesar 1.062749%.

Hasil serupa ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Triadani (2017) yang menjelaskan bahwa dalam jangka pendek pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Kebijakan yang ditunjukkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dapat berdampak negatif terhadap pembangunan manusia dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh negara anggota APEC tidak merata dan tidak difokuskan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melainkan untuk prioritas pembangunan yang lain, misalnya untuk peningkatan infrastruktur dan sebagainya. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi harusnya dilakukan secara berkelanjutan dengan mengarah pada pembangunan manusia dan kebijakan makro agar meningkatnya pertumbuhan ekonomi dapat sejalan dengan pembangunan manusia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di negara APEC.
2. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di negara APEC.
3. Korupsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di negara APEC.
4. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di negara APEC.

SARAN

Berdasarkan hasil dari penelitian, saran untuk mengatasi masalah mengenai pembangunan manusia di negara-negara anggota APEC sebagai berikut:

1. Pemerintah berfokus pada masalah ketidakmerataan pembangunan manusia di antara negara anggota APEC. Hal yang dapat dilakukan yaitu meningkatnya pendapatan per kapita maka akan berpengaruh pada perbaikan kualitas di sektor pendidikan dan kesehatan masyarakat yang selanjutnya akan meningkatkan indeks pembangunan manusia di negara tersebut.
2. Pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana alokasi pemerintah untuk meminimalisir tindakan korupsi yang akan berpengaruh pada pengambilan kebijakan bagi kesejahteraan masyarakat.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel diluar model untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dalam pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

Akcaj, S. (2006). Corruption And Human Development. *Cato Journal*.

Colm, G., & Musgrave, R. A. (1960). *The Theory Of Public Finance: A Study In Public*

Economy. *The Journal Of Finance*.

Del Monte, A., & Papagni, E. (2001). Public Expenditure, Corruption, And Economic Growth: The Case Of Italy. *European Journal Of Political Economy*, 17(1), 1–16.

Hanafi, S. (2018). Pengaruh Korupsi Terhadap Pembangunan Manusia Di Indonesia. *Jurnal Studi Keislaman*, 4(1), 1–19.

Hysa, E. (2011). *Euroeconomica Corruption And Human Development Correlation In Western Balkan Countries Country Case Studies Euroeconomica*. 4(4).

Ichvani, L. F., & Sasana, H. (2019). Pengaruh Korupsi, Konsumsi, Pengeluaran Pemerintah Dan Keterbukaan Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Asean 5. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*.

Lubis, A. Z. A. (2013). Pengaruh Pengeluaran Publik Terhadap Pembangunan (Studi Kasus Pada Negara-Negara ASEAN-4). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*.

Mahulauw, A. K., Santosa, D. B., & Mahardika, P. (2017). Pengaruh Pengeluaran Kesehatan Dan Pendidikan Serta Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Maluku. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.

Mangkoesebroto, Guritno. 2014. *Ekonomi Publik (Edisi Ketiga)*. Yogyakarta: BPFE-UGM.

Mankiw, N. G. (2006). The Macroeconomist As Scientist And Engineer. *Journal Of Economic Perspectives*. <https://doi.org/10.1257/jep.20.4.29>

Mongan, J. J. S. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*.

Mulyaningsih, Y. (2008). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Publik Terhadap Peningkatan Pembangunan Manusia Dan Pengurangan Kemiskinan*.

Peacock, A. T., & Wiseman, J. (1961). Chapters 2 & 3. *The Growth Of Public Expenditure In The United Kingdom*.

Rajkumar, A. S., & Swaroop, V. (2008). Public Spending And Outcomes: Does Governance Matter? *Journal Of Development Economics*.

Sasana, H. (2012). Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Dan Pendapatan Per Kapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Media Ekonomi Dan Manajemen*.

Seligson, M. A., & Kuznets, S. (2019). Economic Growth And Income Inequality. In *The Gap Between Rich And Poor*.

Sims, R. L., Gong, B., & Ruppel, C. P. (2012). A Contingency Theory Of Corruption: The Effect Of Human Development And National Culture. *Social Science Journal*.

Subandoro, Y. K. (2017). Pengaruh Korupsi Terhadap Peranan Pengeluaran Negara Dalam Meningkatkan Pembangunan Manusia. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*.

- Sukirno, S. (2005). Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru. In *Jakarta, Rajawali Pers*.
- Suryadarma, D. (2012). How Corruption Diminishes The Effectiveness Of Public Spending On Education In Indonesia. *Bulletin Of Indonesian Economic Studies*.
- Transparency International. (2012). 2014 Corruption Perceptions Index Results. Triadani, D. (2017). *Analisis Pengaruh Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Lampung Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2011-2015*. 12(1), 145.
- Wagner, R. E., & Weber, W. E. (1977). Wagner's Law, Fiscal Institutions, And The Growth Of Government. *The National Tax Journal*, 30(1), 59–68.
- Widodo, A., Waridin, W., & Kodoatie, J. M. (2012). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*.